

Transformasi Kurikulum Abad ke-21: Analisis Kritis Pendidikan Dasar India dan Bangladesh

Ricardus Jundu^a, Benediktus Lisano Budiono^b

^{ab}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNIKA Santu Paulus Ruteng
ricardjundu@gmail.com^a

DOI: 10.36928/jipd.v9i2.3194

Abstract

This study presents a comparative analysis of basic education reforms in India and Bangladesh, both of which have adopted student-centered and competency-based learning paradigms. India, through the National Education Policy (NEP) 2020, promotes curriculum flexibility, holistic learner development, and the systematic integration of digital technologies to enhance creativity and learner autonomy. In contrast, Bangladesh, through the National Curriculum Framework (NCF) 2021, prioritizes implementation consistency, equitable quality, and the incorporation of moral values and national identity. Despite their differing strategic orientations, both countries confront similar challenges, particularly regarding teacher preparation, infrastructural adequacy, and the persistent gap between macro-level policy directives and micro-level educational practices. The findings underscore that the effectiveness of these reforms depends not only on curriculum design but also on the capacity of each education system to establish a learning ecosystem that is adaptive, reflective, and responsive to the sociocultural contexts of the respective nations.

Keywords: Educational reform; competency-based learning; curriculum policy.

Abstrak

Studi ini menganalisis secara komparatif reformasi pendidikan dasar di India dan Bangladesh yang sama-sama mengadopsi pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis kompetensi. India melalui NEP 2020 mengedepankan fleksibilitas kurikulum, perkembangan holistik, serta integrasi teknologi digital untuk memperkuat kreativitas dan otonomi belajar. Sebaliknya, Bangladesh melalui NCF 2021 menekankan konsistensi implementasi, pemerataan mutu, serta internalisasi nilai moral dan identitas nasional. Meskipun orientasi strategis keduanya berbeda, kedua negara menghadapi tantangan serupa terkait pelatihan guru, kesiapan infrastruktur, dan ketegangan antara kebijakan makro dan praktik mikro. Temuan studi menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi juga pada kapasitas sistem pendidikan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif, reflektif, dan relevan dengan konteks sosial masing-masing negara.

Kata Kunci: Reformasi pendidikan; pembelajaran berbasis kompetensi; kebijakan kurikulum.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi warga negara agar mampu beradaptasi dengan dinamika global. Dalam konteks Asia Selatan, India dan Bangladesh menjadi dua negara yang sedang mengalami transformasi besar dalam kebijakan pendidikan dasar. Keduanya berupaya mereformasi sistem pembelajaran yang selama ini cenderung bersifat tradisional dan berorientasi ujian menuju pendekatan yang lebih berpusat pada siswa serta berbasis kompetensi. Reformasi ini merupakan respons terhadap tuntutan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital sebagai kompetensi utama dalam masyarakat berbasis pengetahuan (Patil & Patil, 2021).

India menegaskan komitmennya terhadap perubahan pendidikan melalui National Education Policy (NEP) 2020, sebuah kebijakan nasional yang mengubah struktur pendidikan dari model lama 10+2 menjadi kerangka baru 5+3+3+4. Reformasi ini bukan sekadar penyusunan ulang jenjang pendidikan,

melainkan perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada hasil ujian menjadi proses pembelajaran yang menekankan perkembangan holistik peserta didik (Isser et al., 2024). Pendekatan baru ini menempatkan pengalaman belajar kontekstual dan tematik sebagai dasar pendidikan yang relevan dengan tahap perkembangan anak serta kebutuhan masyarakat modern.

Di sisi lain, Bangladesh melalui National Curriculum Framework (NCF) 2021 yang dikembangkan oleh National Curriculum and Textbook Board (NCTB) berupaya mereformasi pendidikan dengan memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran aktif (NCTB, 2021). Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem pendidikan tradisional yang menekankan hafalan menuju model yang mendorong pemecahan masalah, kerja sama, dan berpikir kritis. Namun, pelaksanaan reformasi ini masih menghadapi kendala struktural, terutama dalam hal pelatihan guru, keterbatasan fasilitas, dan budaya ujian yang masih mengakar kuat (Alam & Shengquan, 2019).

Integrasi nilai lokal dan nasional menjadi salah satu aspek penting dalam kedua kebijakan tersebut. NEP 2020 di India menekankan pendidikan berbasis nilai (*value-based education*) yang menggabungkan sistem pengetahuan tradisional India dengan nilai-nilai konstitusional seperti pluralisme, sekularisme, dan keadilan sosial (Rathod, 2025). Sementara itu, kurikulum Bangladesh mengintegrasikan nilai-nilai moral, nasionalisme, dan kebersamaan sosial melalui mata pelajaran studi sosial, sejarah kemerdekaan, serta pendidikan moral dan agama yang moderat (Mahmudulhassan et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menganut pendekatan sekuler, mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan identitas kebangsaan.

Peran teknologi dalam pendidikan juga menjadi faktor pembeda yang signifikan antara kedua negara. India dengan cepat mengintegrasikan teknologi digital melalui kebijakan seperti Digital India dan platform pembelajaran daring seperti Diksha dan SWAYAM untuk memperluas akses pendidikan (Patil & Patil, 2021). Sementara Bangladesh menempatkan teknologi sebagai bagian dari strategi nasional Digital Bangladesh Vision 2021 dengan mengembangkan laboratorium komputer, portal guru, serta platform pembelajaran virtual di sekolah-sekolah (UNESCO, 2023). Meskipun demikian, tantangan pemerataan akses dan kesiapan guru masih menjadi hambatan utama dalam implementasi teknologi pendidikan di kedua negara.

Secara pedagogis, India lebih dahulu mengembangkan konsep *Developmentally Appropriate Practices* dan pembelajaran berbasis aktivitas, sedangkan Bangladesh baru mulai mengadopsi pendekatan *learner-centered* melalui NCF 2021. Keduanya menunjukkan arah yang sama menuju konstruktivisme, namun kecepatan dan kualitas implementasi berbeda karena kapasitas sistem pendidikan dan dukungan kebijakan yang tidak seimbang (Rahman & Sarker, 2019). Ini memperlihatkan bahwa inovasi pedagogis memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, perbandingan kurikulum India dan Bangladesh tidak hanya mengungkap perbedaan struktural dan metodologis, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi arah pendidikan di masing-masing negara. Kedua sistem menunjukkan komitmen yang kuat terhadap modernisasi pendidikan, namun keberhasilan reformasi sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat sekolah. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan di negara berkembang dapat menyeimbangkan antara nilai lokal, kebutuhan nasional, dan tuntutan global agar pendidikan menjadi sarana transformasi sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengkaji literatur terkait transformasi kurikulum abad ke-21 ditinjau dari analisis kritis pendidikan dasar India dan Bangladesh. Data diambil dari seluruh artikel ilmiah yang tercantum dalam dokumen asli, dengan fokus pada konsep, temuan empiris, serta kerangka teoritis yang relevan. Proses analisis

dilakukan secara iteratif dan kolaboratif untuk memastikan validitas dan keterpercayaan data, serta menjaga konsistensi dan integritas dengan hanya menggunakan referensi dari dokumen yang diikutsertakan (Creswell, 2014; Nowell et al., 2017; Randolph, 2009). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi kurikulum abad ke 21 lintas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Kurikulum India

1. Struktur dan Isi Kurikulum Pendidikan India

Kebijakan Pendidikan Nasional India tahun 2020 atau National Education Policy (NEP) 2020 menandai transformasi besar dalam sistem pendidikan dasar dengan mengubah struktur lama 10+2 menjadi kerangka baru 5+3+3+4. Reformasi ini dirancang untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Patil & Patil, 2021). Struktur baru ini tidak sekadar membagi jenjang berdasarkan usia dan kelas, tetapi juga merefleksikan tahap-tahap perkembangan anak dari masa dini hingga remaja. Pada tingkat Fondasi (usia 3–8 tahun), fokus utama diarahkan pada pembelajaran berbasis bermain, eksplorasi, dan penggunaan bahasa lokal sebagai medium utama, sementara tingkat Persiapan (kelas 3–5) mulai memperkenalkan pembelajaran konseptual formal secara bertahap.

Memasuki tingkat Menengah (kelas 6–8), sistem pembelajaran di India dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan interdisipliner. Peserta didik mulai diajak untuk mengaitkan konsep antarbidang studi guna memperluas wawasan dan kreativitas berpikir. Tahap ini menekankan pentingnya keterampilan analitis dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata, yang menjadi jembatan menuju jenjang Sekunder (kelas 9–12). Pada tahap Sekunder, kurikulum difokuskan pada pembelajaran multidisipliner serta persiapan karier, di mana peserta didik dapat memilih kombinasi bidang studi yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa NEP 2020 tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kecakapan hidup dan kesiapan kerja peserta didik melalui fleksibilitas kurikulum yang lebih adaptif.

Selain restrukturisasi jenjang pendidikan, NEP 2020 juga memperkuat pentingnya pendidikan multibahasa sebagai pondasi pembelajaran awal. Berdasarkan kebijakan ini, pengajaran hingga kelas 5 dianjurkan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu agar peserta didik mampu memahami konsep dasar dengan lebih baik (Cantika et al., 2025). Pendekatan multibahasa tersebut menjadi strategi pedagogis yang menghargai keragaman linguistik dan budaya di India, sekaligus memperkuat identitas nasional melalui pelestarian bahasa lokal. Mata pelajaran inti yang diajarkan di sekolah dasar meliputi bahasa daerah dan Bahasa Inggris, matematika, sains, studi sosial yang mencakup kajian India dan dunia, seni, serta pendidikan karakter (Isser et al., 2024). Integrasi berbagai disiplin ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di India diarahkan untuk membentuk keseimbangan antara penguasaan kognitif, pengembangan afektif, dan pembentukan moral.

Lebih jauh, meskipun setiap negara bagian serta Central Board of Secondary Education (CBSE) memiliki standar masing-masing, kerangka kurikulum nasional yang disusun oleh National Council of Educational Research and Training (NCERT) berfungsi sebagai pedoman terpadu untuk menjamin konsistensi mutu pendidikan di seluruh wilayah India. Kurikulum NCERT menekankan keseimbangan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk berpikir kritis, literasi digital, dan kolaborasi lintas budaya. Dengan demikian, sistem kurikulum baru yang diatur oleh NEP 2020 tidak hanya berorientasi pada akademik semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun manusia India yang adaptif, kreatif, serta memiliki kesadaran sosial dan nasional yang kuat di tengah arus globalisasi pendidikan.

2. Pendekatan Pedagogis Kurikulum Pendidikan India

Kebijakan Pendidikan Nasional India tahun 2020 (National Education Policy/NEP 2020) secara fundamental berupaya mentransformasi pendekatan pedagogis dengan mengedepankan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning). Melalui kebijakan ini, India menekankan penerapan Developmentally Appropriate Practices yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, serta mempromosikan pembelajaran berbasis aktivitas, penemuan, dan permainan (Gupta, 2022). Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berorientasi pada guru menuju proses belajar yang lebih aktif, kontekstual, dan eksploratif. Dalam konteks ini, NEP 2020 menggarisbawahi pentingnya pembelajaran tematik yang mengaitkan berbagai konsep lintas disiplin secara bermakna, sekaligus mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis (Muralidharan & Singh, 2021).

Pada tahap Fondasi, misalnya, pendekatan pedagogis dirancang untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi melalui aktivitas bermain, bercerita, serta interaksi sosial yang menumbuhkan pemahaman alami terhadap bahasa dan konsep matematika dasar. Strategi ini merefleksikan pandangan konstruktivistik bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Namun, meskipun gagasan tersebut selaras dengan teori pendidikan modern, implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan arah kebijakan. Banyak guru di tingkat sekolah dasar masih menerapkan metode konvensional yang menekankan ceramah dan hafalan, sementara beban kurikulum yang padat seringkali membatasi ruang untuk kreativitas dan pembelajaran bermakna (Rathod, 2025).

Ketimpangan antara idealitas kebijakan dan realitas praktik menjadi isu sentral dalam reformasi pedagogis India. Kajian terbaru menunjukkan bahwa dominasi budaya ujian dan orientasi hasil belajar yang berfokus pada penilaian kognitif masih menghambat penerapan pembelajaran interaktif dan konstruktivistik yang diamanatkan oleh NEP 2020 (Kulal et al., 2024). Meskipun kebijakan sebelumnya seperti Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) telah diperkenalkan untuk menilai perkembangan siswa secara holistik, pelaksanaannya dinilai belum optimal karena kurangnya pelatihan guru serta keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi kurikulum tanpa transformasi praksis pedagogis akan menghasilkan perubahan yang bersifat administratif semata, bukan substantif.

Oleh karena itu, keberhasilan NEP 2020 dalam mewujudkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa sangat bergantung pada reformasi sistemik dan peningkatan kompetensi guru. Pembangunan kapasitas profesional guru menjadi faktor krusial agar mereka mampu mengubah peran dari pengajar tradisional menjadi fasilitator pembelajaran aktif. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dalam bentuk pelatihan berbasis praktik, penyediaan sumber belajar kontekstual, serta sistem evaluasi yang menghargai proses berpikir, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Dengan demikian, implementasi NEP 2020 akan lebih dari sekadar perubahan kurikulum, tetapi menjadi langkah strategis menuju pembelajaran yang transformatif dan relevan dengan tuntutan abad ke-21.

3. Integrasi Nilai Lokal dan Kebijakan Pendidikan Nasional India

Kebijakan Pendidikan Nasional India tahun 2020 (National Education Policy/NEP 2020) menampilkan visi pendidikan yang komprehensif dengan menegaskan integrasi antara nilai-nilai lokal, sistem pengetahuan tradisional, dan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam kerangka kurikulum nasional. Kebijakan ini secara eksplisit menempatkan pendidikan karakter, etika, dan kewarganegaraan sebagai pilar utama dalam pembentukan kepribadian peserta didik sejak usia dini (Isser et al., 2024). NEP 2020 mendorong pendekatan value-based education yang menanamkan nilai-nilai moral universal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional. Melalui integrasi nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal, seperti "Indian knowledge systems," peserta didik diarahkan untuk mengenali akar budaya bangsanya sendiri, mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman, serta menghormati pluralitas yang menjadi ciri khas masyarakat India (Rathod, 2025). Dengan demikian, pendidikan di

India tidak hanya berfokus pada dimensi akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berkarakter dan berintegritas tinggi.

Dalam penerapannya, NEP 2020 memanfaatkan berbagai mata pelajaran dan kegiatan ko-kurikuler sebagai media internalisasi nilai. Pembelajaran sejarah, seni, dan bahasa daerah diarahkan untuk memperkuat kesadaran budaya dan memperkenalkan siswa pada narasi kebangsaan yang inklusif. Pendidikan multikultural dikembangkan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, mengakui perbedaan, serta menjunjung keadilan sosial dan prinsip sekularisme sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi India (Herawati & Novriansyah, 2020). Kebijakan ini sekaligus menunjukkan upaya strategis dalam mengembalikan peran sekolah sebagai arena pembentukan identitas nasional yang selaras dengan kemajuan global. Dalam konteks inilah, NEP 2020 berfungsi sebagai jembatan antara warisan pendidikan tradisional India yang sarat nilai spiritual dan etika dengan sistem pendidikan modern yang menekankan rasionalitas, kreativitas, dan inovasi (Patil & Patil, 2021).

Selain dimensi kultural dan nilai, integrasi kebijakan nasional juga tampak melalui penerapan berbagai program afirmatif yang menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Hak atas Pendidikan (Right to Education/RTE Act) tahun 2009 dan program Sarva Shiksha Abhiyan menjadi fondasi bagi pemerataan kesempatan belajar, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah pedalaman. Pemerintah India juga berupaya menanamkan literasi sains, teknologi, seni, dan matematika (STEAM literacy) serta kesadaran kewarganegaraan global melalui gerakan nasional seperti Swachh Bharat (India Bersih) dan Fit India yang diintegrasikan dalam modul pendidikan kewarganegaraan di sekolah (Rathod, 2025). Dengan demikian, kebijakan pendidikan India mencerminkan keseimbangan antara pelestarian identitas budaya nasional dan penguatan daya saing global, menghasilkan sistem pendidikan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa sekaligus adaptif terhadap tantangan abad ke-21 (Singh, 2025).

4. Reformasi Kurikulum Pendidikan India

Reformasi kurikulum di India mencapai puncaknya melalui diberlakukannya National Education Policy (NEP) 2020, yang secara resmi diumumkan pada tahun 2020 dan mulai diimplementasikan sejak 2021. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan India karena mengubah filosofi kurikulum dari yang bersifat kaku dan terfragmentasi menjadi lebih holistik, fleksibel, serta berpusat pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Perubahan struktural dari sistem 10+2 menjadi kerangka 5+3+3+4 tidak hanya merevisi jenjang pendidikan, tetapi juga mengubah paradigma pembelajaran ke arah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21 (Patil & Patil, 2021). Dalam konteks ini, NEP 2020 menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan akademik, keterampilan abad modern, serta nilai-nilai budaya yang membentuk karakter warga negara yang kritis dan berintegritas.

Salah satu terobosan paling signifikan dari reformasi ini adalah penghapusan sistem peminatan (streaming system) di jenjang menengah, yang sebelumnya membatasi siswa dalam memilih antara jalur sains, seni, atau bisnis. NEP 2020 membuka peluang bagi peserta didik untuk merancang kombinasi bidang studi yang lebih bebas dan sesuai dengan minat serta potensi mereka, sehingga kurikulum menjadi lebih personal dan multidisipliner (Dhage et al., 2023). Pendekatan ini mencerminkan filosofi pendidikan progresif yang menghargai kebebasan intelektual dan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, reformasi juga menggantikan sistem Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) dari National Curriculum Framework (NCF) 2005 dengan sistem penilaian berbasis kompetensi. Model baru ini berfokus pada pengukuran kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, bukan sekadar hafalan akademik.

Di sisi lain, peran National Council of Educational Research and Training (NCERT) semakin diperkuat sebagai lembaga pengembang kurikulum nasional yang bertanggung jawab menciptakan buku ajar dan bahan belajar yang lebih kontekstual, relevan dengan kehidupan siswa, serta berorientasi pada nilai-nilai sosial dan budaya lokal (Isser et al., 2024). Upaya ini mencerminkan komitmen

pemerintah India untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara visi besar kebijakan NEP dan praktik guru di lapangan, di mana metode konvensional dan budaya ujian masih kuat memengaruhi proses pembelajaran (Bhardwaj & Hazarika, 2022). Oleh karena itu, meskipun NEP 2020 telah menetapkan arah reformasi yang transformatif menuju masyarakat berbasis pengetahuan, keberhasilan implementasinya tetap memerlukan dukungan sistemik berupa pelatihan guru, adaptasi kurikulum lokal, serta konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh wilayah India.

5. Peran Teknologi dalam Pendidikan India

India secara strategis menempatkan teknologi sebagai kekuatan transformatif dalam pembangunan sistem pendidikannya, sebagaimana ditegaskan dalam National Education Policy (NEP) 2020 yang merekomendasikan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) sebagai motor utama pembelajaran digital di seluruh jenjang pendidikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dengan meluncurkan berbagai platform nasional, seperti Diksha, yaitu portal sumber belajar interaktif bagi guru dan siswa, serta SWAYAM, platform Massive Open Online Course (MOOC) yang menyediakan ribuan kursus daring gratis dari lembaga pendidikan ternama (Patil & Patil, 2021). Selain itu, NEP 2020 juga memperkenalkan literasi digital dan pendidikan pengkodean (coding) sejak tingkat sekolah dasar, memperkuat kompetensi abad ke-21 yang menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir komputasional. Kehadiran perusahaan EdTech seperti BYJU's, Unacademy, dan Vedantu semakin mempercepat transformasi pendidikan India dengan menghadirkan model pembelajaran adaptif, personal, dan berbasis data yang mampu menjangkau siswa hingga ke pelosok negeri.

Integrasi teknologi dalam sistem pendidikan India bukan hanya sekadar modernisasi instrumen belajar, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif, dinamis, dan berorientasi masa depan. Penggunaan platform digital memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai gaya dan kecepatan belajar peserta didik, sekaligus mendorong guru untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses eksplorasi pengetahuan. Inovasi ini juga memperluas makna ruang kelas tradisional, menjadikannya ruang kolaboratif yang menghubungkan siswa dengan sumber belajar global. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital dan disparitas akses internet di wilayah pedesaan. Meski demikian, komitmen India terhadap transformasi pendidikan berbasis teknologi tetap kuat, terlihat dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas guru, memperluas jaringan konektivitas, serta menanamkan nilai literasi digital sejak dini. Dengan demikian, NEP 2020 tidak hanya menciptakan fondasi bagi sistem pembelajaran modern, tetapi juga menegaskan bahwa teknologi merupakan sarana strategis untuk mewujudkan pemerataan, kualitas, dan relevansi pendidikan di era digital.

Hasil Kajian Kurikulum Bangladesh

1. Struktur dan Isi Kurikulum Pendidikan Bangladesh

Struktur kurikulum pendidikan dasar di Bangladesh dirancang dengan sistem yang berjenjang dan sistematis, mencakup jenjang pendidikan dasar selama lima tahun (kelas 1–5) dan pendidikan menengah bawah selama tiga tahun (kelas 6–8), sebelum peserta didik melanjutkan ke tingkat menengah atas. Kurikulum ini disusun oleh National Curriculum and Textbook Board (NCTB) berdasarkan kerangka National Curriculum Framework (NCF) 2012 dan diperbarui pada 2021 dengan orientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pengembangan keterampilan abad ke-21 (NCTB, 2021). Mata pelajaran utama yang diajarkan meliputi Bahasa Bengali, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Studi Bangladesh dan Global, Pendidikan Agama atau Moral, serta Seni dan Pendidikan Jasmani (Herawati & Novriansyah, 2020). Kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran melalui pendekatan tematik dan kontekstual yang bertujuan menumbuhkan

kemampuan berpikir kritis, literasi, serta kesadaran sosial sejak usia dini. Bahasa pengantar yang digunakan umumnya Bengali, meskipun sekolah swasta premium lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, yang mencerminkan adanya perbedaan pendekatan dalam implementasi kurikulum nasional antara sekolah negeri dan swasta.

Dari segi isi dan orientasi, kurikulum Bangladesh dirancang untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, karakter moral, serta pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan realitas sosial-ekonomi masyarakatnya. Pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran aktif diterapkan untuk mengembangkan kompetensi lintas disiplin seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah (A. K. M. B. Alam & Shengquan, 2019). Reformasi kurikulum yang dilakukan oleh NCTB juga bertujuan menciptakan keterpaduan antara bidang akademik dan nonakademik sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh kemampuan akademis tetapi juga karakter dan sikap sosial yang baik. Namun, meskipun secara konseptual kurikulum ini progresif, (Alam et al., 2022) menunjukkan bahwa struktur kurikulum di Bangladesh masih bersifat kompleks dengan adanya lebih dari tiga arus utama pendidikan yang berjalan paralel, yaitu pendidikan umum, madrasah, dan sekolah berbahasa Inggris, yang menyebabkan kurangnya keseragaman dalam pendekatan pedagogis dan hasil pembelajaran. Hal ini menjadikan sistem pendidikan Bangladesh masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan mutu dan keadilan akses antarjenis sekolah.

Kendati reformasi kurikulum telah diarahkan untuk meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan global, implementasinya masih menghadapi kendala substansial di tingkat lapangan. Bain, (2023) menyoroti bahwa dalam bidang pendidikan sains misalnya, kurikulum belum sepenuhnya tersusun secara sistematis dan berurutan sehingga berpengaruh terhadap pemahaman konseptual peserta didik. Di sisi lain, Rahman & Sarker (2019) menemukan bahwa pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar masih bersifat tradisional dan berbasis hafalan dengan penggunaan bahasa Bengali sebagai bahasa pengantar dominan yang membatasi keterampilan komunikatif siswa. Kesenjangan ini diperburuk oleh kondisi kelas yang terlalu besar, beban kerja guru yang tinggi, serta keterbatasan alat bantu belajar yang menghambat penerapan pembelajaran aktif dan kontekstual. Dengan demikian, meskipun kebijakan kurikulum nasional mengarah pada inovasi dan pengembangan kompetensi abad ke-21, pelaksanaannya masih belum mampu sepenuhnya mendukung transformasi pedagogis yang diharapkan.

Secara umum, sistem kurikulum dasar Bangladesh mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan capaian lebih dari 95 persen anak usia 6–10 tahun telah terdaftar di sekolah (Mahmudulhassan et al., 2024). Namun, keberhasilan kuantitatif ini belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Masalah utama yang dihadapi antara lain adalah kesenjangan antara desain kurikulum dan praktik pengajaran di kelas, kurangnya pelatihan profesional bagi guru, serta keterbatasan sumber daya pendidikan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, meskipun secara konseptual kurikulum Bangladesh sudah dirancang dengan landasan filosofis yang kuat dan visi modern terhadap pendidikan berbasis kompetensi, efektivitasnya dalam menghasilkan pembelajaran bermakna masih memerlukan penguatan sistemik, peningkatan kapasitas guru, serta sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan nyata di sekolah-sekolah dasar.

2. Pendekatan Pedagogis Kurikulum Pendidikan Bangladesh

Pendekatan pedagogis dalam kurikulum sekolah dasar di Bangladesh sedang mengalami perubahan signifikan dari tradisi pengajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik. Selama beberapa dekade, sistem pendidikan di Bangladesh dikenal sangat exam-centric, dengan penilaian kognitif menjadi fokus utama dalam ujian nasional seperti Primary School Certificate (PSC) untuk kelas 5 dan Junior School Certificate (JSC) untuk kelas 8. Akibatnya, metode pengajaran cenderung konvensional dan berfokus pada hafalan semata (rote learning), sehingga menghambat perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik (Rahman & Sarker, 2019). Reformasi kurikulum terbaru melalui National Curriculum Framework 2021 berusaha mengatasi

kelemahan ini dengan memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi, proyek, dan kolaborasi. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, berpikir reflektif, serta komunikasi efektif antar peserta didik. Di beberapa sekolah urban, proyek percontohan berbasis inkuiri, seperti kegiatan pemetaan banjir komunitas, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Transformasi ini menandai langkah progresif dalam upaya Bangladesh membangun sistem pendidikan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21, meskipun masih terbatas pada wilayah perkotaan dan sekolah-sekolah tertentu (NCTB, 2021).

Namun, meskipun arah kebijakan pedagogis sudah jelas menuju paradigma pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Budaya ujian yang telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan, kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif, serta keterbatasan sumber daya dan alat bantu belajar menjadi penghambat utama keberhasilan reformasi tersebut (Rahman & Sarker, 2019). Ukuran kelas yang besar dan beban kerja guru yang tinggi juga berdampak pada rendahnya efektivitas penerapan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif seperti portofolio siswa. Meskipun demikian, upaya pemerintah Bangladesh untuk menyeimbangkan pendekatan tradisional dengan model yang lebih learner-centered menunjukkan komitmen terhadap perubahan berkelanjutan. Reformasi ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan abad ke-21 tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan keterampilan, karakter, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, meskipun proses transformasi pedagogis di Bangladesh masih berada pada tahap awal, arah perubahan ini memberikan harapan bagi terwujudnya sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan humanistik di masa mendatang.

3. Integrasi Nilai Lokal dan Kebijakan Pendidikan Nasional Bangladesh

Integrasi nilai-nilai lokal dan kebijakan pendidikan nasional di Bangladesh mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat identitas nasional sekaligus menumbuhkan kesadaran multikultural di tengah masyarakat yang beragam. Kurikulum nasional Bangladesh secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai nasional dan lokal melalui mata pelajaran Studi Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi menanamkan semangat nasionalisme, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Sejak kemerdekaan tahun 1971, sistem pendidikan di Bangladesh dikembangkan dengan prinsip sekularisme yang berpadu dengan pendidikan moral dan etika kebangsaan (Herawati & Novriansyah, 2020). Dalam konteks ini, kurikulum mengintegrasikan sejarah perjuangan bangsa, nilai demokrasi, dan prinsip keadilan sosial sebagai bagian penting dari pembentukan karakter siswa. National Education Policy 2010 bahkan menegaskan pentingnya pendidikan agama yang moderat dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi sarana penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan moralitas dan kesadaran kewargaan (NCTB, 2021).

Kebijakan kurikulum terbaru yang dirancang melalui National Curriculum Framework 2021 turut memperluas ruang integrasi nilai dengan menambahkan dimensi pendidikan lingkungan, keberlanjutan, dan tanggung jawab global. Nilai-nilai keberlanjutan tersebut diwujudkan dalam topik-topik seperti pendidikan iklim, konservasi sumber daya, dan kesadaran terhadap dampak sosial-ekonomi pembangunan. Selain itu, kurikulum juga memuat pendekatan value-based education yang menekankan pentingnya kolaborasi, toleransi, dan empati sosial di antara peserta didik. Implementasi kebijakan nasional seperti program Primary Education Development Program (PEDP3) yang menyediakan buku pelajaran gratis, bantuan finansial bagi siswa miskin, serta kuota bagi anak berkebutuhan khusus mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan (Mahmudulhassan et al., 2024). Langkah-langkah ini memperlihatkan bagaimana pendidikan di Bangladesh diarahkan untuk tidak hanya mengembangkan kecerdasan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan.

Integrasi nilai lokal juga tampak dalam upaya sekolah menghidupkan tradisi dan kearifan lokal melalui kegiatan ko-kurikuler dan organisasi berbasis etika, seperti Ethics Clubs Bangladesh, yang

bertujuan menanamkan nilai moral, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas. Pendidikan moral yang disampaikan melalui mata pelajaran Islam and Moral Education memperkuat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai spiritual, kejujuran, dan rasa hormat antarumat beragama, tanpa meninggalkan semangat sekularisme yang menjadi dasar negara Bangladesh. Sinergi antara nilai-nilai lokal Islam, nasionalisme sekuler, dan tujuan pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Bangladesh berupaya membangun fondasi kebangsaan yang kuat sekaligus terbuka terhadap tantangan global. Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional Bangladesh tidak hanya menjadi instrumen pelestarian identitas budaya, tetapi juga sebagai pendorong terbentuknya masyarakat berkarakter, toleran, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Rahman & Sarker, 2019).

4. Reformasi Kurikulum Pendidikan Bangladesh

Reformasi kurikulum di Bangladesh mencerminkan perubahan besar dalam arah kebijakan pendidikan nasional melalui penerapan National Curriculum Framework (NCF) 2021 yang dikembangkan oleh National Curriculum and Textbook Board (NCTB). Reformasi ini menggeser orientasi pendidikan dari pendekatan tradisional berbasis ujian menuju pembelajaran yang berpusat pada kompetensi, proyek, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. NCF 2021 menekankan pentingnya literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas sebagai inti dari proses belajar. Dalam kurikulum baru ini, materi seperti coding diperkenalkan sejak jenjang awal, sedangkan pembelajaran robotika dimasukkan pada tingkat menengah untuk membangun kesiapan peserta didik menghadapi era industri digital. Upaya reformasi ini juga selaras dengan visi pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara kecakapan akademik, pembentukan karakter, dan nilai-nilai sosial serta kebangsaan yang inklusif.

Selain perubahan pada kurikulum, pemerintah Bangladesh juga melakukan penguatan di sektor kebijakan pendidikan dasar melalui pelaksanaan program Primary Education Development Program (PEDP I–III, 2000–2016) dan saat ini PEDP IV yang dimulai pada tahun 2020. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta perhatian terhadap kelompok siswa yang terpinggirkan sebagaimana dicatat oleh World Bank (World Bank, 2018). Sementara itu, kebijakan New Education Policy 2010 mempertegas pendidikan wajib delapan tahun dan prioritas pada pembangunan infrastruktur pendidikan dasar, termasuk pemisahan kementerian agar lebih fokus pada pengelolaan sekolah dasar. Reformasi kurikulum yang relatif stabil juga terlihat dari National Curriculum Framework 2012 yang telah menambahkan mata pelajaran abad ke-21 seperti ICT dan penguatan pendidikan kejuruan di sekolah dasar. Dengan demikian, reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan di Bangladesh tidak hanya menekankan pada transformasi isi pembelajaran, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan global secara berkelanjutan.

5. Peran Teknologi dalam Pendidikan Bangladesh

Peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam sistem pendidikan Bangladesh menempati posisi sentral dalam kebijakan nasional yang berorientasi pada transformasi digital melalui visi Digital Bangladesh Vision 2021. Pemerintah bersama pemangku kepentingan pendidikan berkomitmen mengintegrasikan ICT secara luas ke dalam proses pembelajaran untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Berdasarkan dokumen National Curriculum Framework (NCF) 2021, keterampilan digital dipandang sebagai kompetensi fundamental yang wajib dimiliki siswa sejak jenjang sekolah dasar. Integrasi teknologi tidak hanya diterapkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi juga dimanfaatkan secara lintas disiplin untuk memperkuat pembelajaran berbasis proyek, sains, matematika, maupun bahasa. Pemerintah telah menyediakan laboratorium komputer, koneksi internet di sekolah, serta platform nasional seperti Konnect, Teachers' Portal, dan Virtual Class untuk mendukung pembelajaran digital secara lebih interaktif dan inklusif.

Selain aspek kurikulum, pemerintah Bangladesh juga berfokus pada pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kapasitas guru melalui berbagai inisiatif strategis seperti ICT in Education Master Plan 2012–2021 dan distribusi perangkat teknologi serta kuota data kepada siswa dan guru. Upaya tersebut diperkuat dengan target akses internet seratus persen di sekolah menengah pada tahun 2025 serta pengembangan konten e-learning oleh National Curriculum and Textbook Board (NCTB). Meskipun demikian, implementasi integrasi ICT masih menghadapi kendala, terutama dalam pemerataan pelatihan guru, keterbatasan fasilitas di daerah pedesaan, dan kesiapan pedagogis dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Pandemi COVID-19 turut mempercepat penerapan blended learning dan mendorong lahirnya Post-COVID ICT Roadmap yang mempertegas arah pendidikan hibrid di Bangladesh. Secara keseluruhan, penerapan ICT dalam pendidikan bukan hanya simbol modernisasi, tetapi juga wujud komitmen negara dalam menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi digital generasi muda.

Pembahasan

Sistem pendidikan India dan Bangladesh sama-sama berupaya membangun kerangka kurikulum yang berorientasi pada kompetensi abad ke-21, tetapi keduanya menunjukkan arah transformasi yang berbeda secara fundamental. India melalui National Education Policy (NEP) 2020 memperkenalkan reformasi besar dengan mengubah sistem 10+2 menjadi struktur 5+3+3+4, menyesuaikan tahap pendidikan dengan perkembangan anak, serta menekankan fleksibilitas dan pendekatan multidisipliner (Patil & Patil, 2021). Sementara itu, Bangladesh melalui National Curriculum Framework (NCF) 2021 yang dikembangkan oleh National Curriculum and Textbook Board (NCTB) menegaskan pendidikan berbasis kompetensi dan pembelajaran aktif, dengan fokus pada moralitas, kebangsaan, dan keterampilan abad ke-21. Kedua negara menampilkan visi yang serupa dalam hal relevansi global dan kebutuhan pembelajaran kontekstual, tetapi strategi implementasinya berseberangan karena India memilih desentralisasi dan otonomi pendidikan, sedangkan Bangladesh menekankan harmonisasi dan keseragaman sistem di tingkat nasional.

Dari segi struktur, NEP 2020 di India menata ulang pendidikan dari tingkat fondasi hingga menengah dengan prinsip fleksibilitas dan keberlanjutan. Kurikulum India tidak hanya dirancang untuk mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan potensi personal, sosial, dan emosional peserta didik melalui pendekatan tematik, integratif, dan berbasis pengalaman (Gupta, 2022). Sementara Bangladesh mempertahankan struktur 5 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah awal dengan fokus pada pembelajaran berjenjang yang menumbuhkan literasi dasar, nilai moral, serta kesadaran sosial (NCTB, 2021). Walaupun keduanya berorientasi pada keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, kurikulum India bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan daerah, sedangkan kurikulum Bangladesh bersifat lebih seragam untuk menjaga kesetaraan kualitas antarwilayah dan jalur pendidikan.

Dalam aspek pedagogis, India menegaskan pergeseran paradigma dari pembelajaran berbasis guru menuju student-centered learning dengan prinsip Developmentally Appropriate Practices (Muralidharan & Singh, 2021). Pendekatan ini berfokus pada aktivitas eksploratif, proyek, dan permainan yang menumbuhkan berpikir kritis dan kreativitas. Namun, tantangan muncul ketika idealitas kebijakan tidak sepenuhnya diikuti oleh praktik lapangan karena banyak guru masih menggunakan metode konvensional akibat budaya ujian yang kuat (Rathod, 2025). Di sisi lain, Bangladesh baru memulai transisi dari pembelajaran berpusat pada hafalan menuju sistem berbasis proyek dan kompetensi. Reformasi pedagogis di bawah NCF 2021 mulai mendorong pendekatan inkuiri dan kolaboratif, namun implementasinya terhambat oleh keterbatasan pelatihan guru, ukuran kelas yang besar, dan kurangnya fasilitas pendukung (Rahman & Sarker, 2019). Dengan demikian, kedua negara masih menghadapi kesenjangan signifikan antara ideal kebijakan dan realitas pendidikan di ruang kelas.

Dari perspektif nilai, NEP 2020 di India menegaskan integrasi sistem pengetahuan lokal dan nilai-nilai tradisional ke dalam kerangka kurikulum nasional. Pendidikan karakter, etika, dan

kewarganegaraan ditempatkan sebagai pilar utama dalam pembentukan kepribadian siswa sejak dini dengan penekanan pada pluralisme, toleransi, dan kesadaran budaya (Isser et al., 2024). Sebaliknya, Bangladesh menerapkan pendekatan sekuler yang tetap memberi ruang bagi pendidikan moral dan agama. Kurikulum mereka menyeimbangkan nilai-nilai Islam lokal dengan prinsip nasionalisme, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui mata pelajaran Studi Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, siswa diperkenalkan pada sejarah kemerdekaan, identitas nasional, dan tanggung jawab sosial (Herawati & Novriansyah, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa jika India menekankan multikulturalisme sebagai ekspresi kekayaan sosial, Bangladesh menekankan integrasi nilai sebagai sarana pembentukan kesatuan nasional.

Dalam bidang reformasi kebijakan, India menunjukkan langkah yang lebih progresif dan visioner. Reformasi NEP 2020 tidak hanya mengubah struktur kurikulum tetapi juga filosofi pendidikan dari sistem yang kaku menjadi fleksibel dan berpusat pada peserta didik (Dhage et al., 2023). Sementara Bangladesh baru memulai fase modernisasi menyeluruh melalui NCF 2021 dengan tujuan menggantikan sistem ujian tradisional menjadi penilaian berbasis kompetensi dan pembelajaran aktif. Namun, meskipun arah reformasi Bangladesh sudah jelas, implementasinya menghadapi kendala sistemik seperti kesenjangan infrastruktur dan kapasitas guru. Di sisi lain, India meski sudah lebih maju tetap berhadapan dengan tantangan mempertahankan konsistensi pelaksanaan di daerah pedesaan dan antarnegara bagian (Bhardwaj & Hazarika, 2022).

Peran teknologi menjadi elemen kunci dalam kedua kebijakan pendidikan modern tersebut. India mengembangkan ekosistem digital melalui platform Diksha dan SWAYAM serta mengintegrasikan literasi digital dan pengkodean sejak tingkat dasar (Patil & Patil, 2021). Teknologi dipandang sebagai sarana pembelajaran yang adaptif dan inklusif, memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil, serta meningkatkan profesionalisme guru. Sementara Bangladesh melaksanakan Digital Bangladesh Vision 2021 dan ICT in Education Master Plan yang mendorong pemanfaatan teknologi di semua jenjang pendidikan. Pemerintah membangun Teachers' Portal, laboratorium komputer, dan pelatihan ICT bagi guru untuk memperkuat literasi digital nasional (UNESCO, 2023). Walau keduanya menghadapi masalah kesenjangan akses, India lebih unggul dalam skalabilitas dan keberlanjutan ekosistem pembelajaran digital, sedangkan Bangladesh masih berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan pemerataan jaringan internet.

SIMPULAN

Berdasarkan studi komparasi di atas dapat disimpulkan bahwa India dan Bangladesh sama-sama menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pendidikan melalui integrasi nilai lokal, transformasi pedagogis, dan adopsi teknologi digital. Namun, perbedaan filosofis mendasar terlihat pada orientasi strategisnya. India memprioritaskan fleksibilitas, kreativitas, dan desentralisasi kebijakan untuk menumbuhkan kebebasan intelektual, sedangkan Bangladesh berfokus pada konsistensi, pemerataan mutu, dan penguatan identitas nasional. Keduanya menghadapi tantangan yang serupa, yakni kesenjangan antara kebijakan makro dan praktik mikro di lapangan. Keberhasilan reformasi pendidikan di kedua negara akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu menginvestasikan sumber daya pada pelatihan guru, memperkuat infrastruktur, dan membangun budaya belajar yang reflektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, studi komparatif ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan abad ke-21 tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi juga pada ekosistem pembelajaran yang humanis, adaptif, dan kontekstual terhadap realitas sosial masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. K. M. B., & Shengquan, L. (2019). Primary School Teachers in 21st Century in Bangladesh: Some Potential Aspects for Professional Development Identified from Relevant Literatures. *International Journal of Education*, 11(4), 48–65. <https://doi.org/10.5296/ije.v11i4.15433>

Vol. 9 No. 2, 2025 Hal. 18-29

<https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jipd/index>

- Alam, M. J., Islam, S. R. Bin, & Ogawa, K. (2022). *Discrete Primary Education Curriculum in Bangladesh: Implications of Gamification for Quality Education*. In C.-A. Lane (Ed.), *Handbook of Research on Acquiring 21st Century Literacy Skills Through Game-Based Learning*. IGI Global: Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7271-9.ch036>
- Bain, K. (2023). Exploring the Sequence of Science Contents in the Intended Primary Curriculum of Bangladesh. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 49(4), 70–83. <https://doi.org/10.9734/AJESS/2023/v49i41189>
- Bhardwaj, M., & Hazarika, D. D. (2022). Primary School Curriculum and Impact n Cognitive Learning - A Review Based Analysis. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(8), 3069–3088. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S08.383>
- Cantika, V. M., Susilana, R., & Johan, R. C. (2025). Peran Kurikulum dalam Pelestarian Bahasa Daerah: Studi Komparatif Kurikulum India dan Kurikulum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 33–64. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.5685>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In Sage Publication (3rd ed.). Sage Publication.
- Dhage, P. R., Rizvi, N., Kalnawat, A., & Sharma, P. (2023). Tracing The Roots of National Education Policy 2020 And the Indian Constitutional Dimensions Pertaning to It. *Russian Law Journal*, 11(1), 108–114.
- Gupta, A. (2022). Global and local discourses in India’s policies for early childhood education: policy borrowing and local realities. *Comparative Education*, 58(3), 364–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03050068.2022.2062949>
- Herawati, & Novriansyah, B. (2020). Topic: Multicultural education in South Asia; A Comparatif Study Between India, Bangladesh and Pakistan. *Edukasia Multikultura*, 2(1), 38–54.
- Isser, S. S., Nihal, R., Tomar, M., Marwaha, S. S., & Shastri, S. (2024). Value-based education in NEP 2020: fostering ethical and moral growth through Dharma. *Asian Education and Development Studies*, 15(5), 579–597. <https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2024-0121>
- Kulal, A., Abhishek, N., Dinesh, S., Bhat, D. C., & Girish, A. (2024). Evaluating the Promise and Pitfalls of India’s National Education Policy 2020: Insights from the Perspectives of Students, Teachers, and Experts. *Sage Open*, 1–18. <https://doi.org/10.1177/21582440241279367>
- Mahmudulhassan, Waston, W., Amini, S., Sholeh, M. M., & Muthoifin, M. (2024). A moral-based curriculum to improve civilization and human resource development in Bangladesh. *Multidisciplinary Reviews*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31893/multirev.2024137>
- Muralidharan, K., & Singh, A. (2021). India’s New National Education Policy: Evidence and Challenges. *Science*, 372(6537), 36–38. <https://doi.org/10.1126/science.abf6655>
- NCTB. (2021). National Curriculum Framework 2021 Pre-Primary to Grade 12.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis : Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Patil, V. K., & Patil, K. D. (2021). Traditional Indian Education Values and New National Education Policy Adopted by India. *Journal of Education*, 203(1), 242–245. <https://doi.org/10.1177/00220574211016404>
- Rahman, M. M., & Sarker, T. R. (2019). Jurnal Pendidikan Progresif. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 9(1), 6–15. <https://doi.org/10.23960/jpp.v9.i1.201902>
- Randolph, J. J. (2009). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. *Practical Assesment, Research & Evaluation*, 14(13), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.7275/b0az-8t74>
- Rathod, D. K. (2025). Ethics, values, and innovations in education - A study. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 12(9), 23–28.
- Singh, A. K. (2025). From policy to practice: Challenges and pathway for advancing multilingual education through India’s national education policy 2020. *Policy Futures in Education Manuscript*, 23(4), 746–765. <https://doi.org/10.1177/14782103251320532>
- World Bank. (2018). *BANGLADESH: Quality Learning for All Program for Fourth Primary Education Development Program*. World Bank.